

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang diikuti dengan perubahan sistem politik secara cepat dan mendasar maka perkembangan politik Indonesia berjalan secara dinamis dan kompetitif. Di ranah politik lokal, dinamika itu tidak sekadar ditandai dengan penerapan otonomi daerah secara penuh dibanding era sebelumnya, tetapi juga dengan penerapan sistem pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung sejak pertengahan tahun 2005 yang melengkapi mekanisme demokrasi elektoral pemilihan presiden (Pilpres) langsung yang telah dilakukan sejak 2004. Terhadap fenomena itu, Choi (2001) mencatat bahwa proses simultan reformasi demokratis dan pemerintahan di Indonesia telah mengubah pemerintahan yang terpusat di masa lalu ke arah praktik demokrasi dan desentralisasi. Reformasi demokratis itulah yang mendorong praktik Pemilu langsung yang kompetitif yang menyertai desentralisasi pemerintahan. Dalam konteks itulah Pemilukada langsung merupakan pengejawantahan bentuk desentralisasi Pemilu pemerintahan sebagai bagian integral dari sistem politik di Indonesia.

Perkembangan yang dinamis dalam ranah politik lokal di Indonesia dewasa ini tentu merupakan bagian dari babak sejarah politik yang berbeda dengan masa lalu, yaitu ketika Pemilu sekadar bertumpu pada kepentingan memilih anggota legislatif. Sebagaimana dicatat Gaffar (1992), sejak terjadinya

perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial pada 1949 ikhtiar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota parlemen. Karena itulah kajian-kajian tentang Pemilu, terutama yang berperspektif perilaku pemilih (*voters behavior*) bertumpu pada konteks Pemilu legislatif (Gaffar, 1992; Malarangeng, 1997; King, 2003). Dalam konteks ini kajian perilaku pemilih di Indonesia biasanya dikaitkan dengan pengalaman Pemilu 1955 sebagai Pemilu nasional pertama kali dalam sejarah Indonesia yang menghasilkan corak politik aliran yang khas. Gaffar, misalnya, meskipun menelaah perilaku pemilih dalam Pemilu masa Orde Baru ternyata perspektifnya tetap merujuk pada politik-aliran Geertzian yang tak lepas dari konteks pengalaman Pemilu 1955.

Namun demikian, sejak diselenggarakannya Pilpres langsung tahun 2004 yang disusul Pemilukada langsung pada tahun 2005 kajian-kajian tentang perilaku pemilih mengalami perkembangan yang signifikan. Sejarah Pemilukada langsung di Indonesia mengemuka sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencatat Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka Pemilukada dimasukkan dalam rezim Pemilu dengan Pemilukada pertama adalah Pemilukada DKI Jakarta tahun 2007. Pemilihan langsung telah membuka ruang partisipasi politik rakyat secara langsung dalam proses penentuan pemimpin nasional dan daerah. Berbeda dari Pilpres yang berskala nasional, Pemilukada yang berskala lokal memiliki nuansa yang lebih kaya, karena setiap daerah memiliki karakter sosial-politik

yang berbeda-beda. Karena itulah pengalaman demokrasi lokal di Indonesia selalu menarik untuk diteliti dengan kemungkinan hasil atau kesimpulan yang berbeda-beda.

Pada dewasa ini, khususnya pasca-Pilpres 2014, mekanisme Pemilukada langsung kembali menjadi polemik menyusul rencana Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan mekanisme Pemilukada secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut menunjukkan gambaran penyelenggaraan Pemilukada secara langsung telah memicu respons yang eskalatif sebagai isu nasional. Apabila Pemilukada dikembalikan lagi ke DPRD maka akan berimplikasi pada konteks perilaku pemilih dari masa sebelumnya yang telah berpartisipasi dan menentukan suara secara langsung menjadi sekadar kelompok-kelompok penekan tidak langsung dalam proses Pemilukada.

Berbeda dari Pilpres yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penyelenggaraan Pemilukada langsung merupakan konsekuensi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72-73/PUU/2004 yang menyebutkan, “Pemilukada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945” (Konstitusi, 2004). Adapun Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah merupakan hasil amandemen kedua Konstitusi pada tahun 2000 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Jadi, apa yang diputuskan MK merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Pemilukada di tingkat lokal.

Menurut Romli (2008) ada sejumlah kelebihan Pemilukada langsung, yaitu (1) Pemilukada langsung memutus politik oligarki oleh sekelompok elit politik dalam penentuan kepala daerah, (2) memperkuat *checks and balances* dengan DPRD, (3) legitimasinya kuat karena langsung mendapat mandat dari rakyat, (4) menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, dan (5) menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat.

Selain melibatkan partisipasi masyarakat, Pemilukada langsung juga menjadikan demokrasi lokal lebih semarak, kalau bukan telah menjadi semacam lahan industrial politik. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kompetisi politik lokal melibatkan partai-partai politik yang secara formal memiliki fungsi kandidasi seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang memungkinkan calon perseorangan ikut serta dalam Pemilukada langsung. Lazimnya sebuah kompetisi politik, di level teknis, Pemilukada juga melibatkan tim-tim sukses pemenangan masing-masing kandidat dan selaras dengan itu terlibat pula biro-biro iklan dan lembaga-lembaga *polling* yang bekerja secara profesional. Mengingat proses kandidasi dan kompetisi membutuhkan modal atau finansial yang tidak sedikit maka Pemilukada juga membuka ruang bagi kehadiran para pemodal politik. Terkait dengan hal tersebut dan seiring dengan praktik Pemilukada langsung yang melibatkan rakyat secara massif maka praktik-praktik politik uang (*money politics*) dan suburnya pragmatisme-transaksional seringkali tidak terhindarkan.

Kompetisi politik lokal biasanya lebih dinamis ketimbang skala nasional, karena adanya ikatan sosial, kultural, dan emosional yang lebih kental di lingkup

lokal. Itulah sebabnya dalam kasus-kasus tertentu fenomena dinasti politik yang bercorak klientalistik dalam politik lokal tetap bisa berkembang dalam mekanisme Pemilukada langsung. Romli (2008) mencatat beberapa kecenderungan Pemilukada langsung sejak diselenggarakan pada tahun 2005, yaitu (1) faktor figur begitu sentral, (2) para *incumbent* tetap mempertahankan kekuasaan, (3) calon yang diusung koalisi partai lebih banyak menang dibandingkan dengan calon yang diusung satu partai, (4) partai-partai kecil ikut berpartisipasi dalam Pemilukada di hampir semua daerah, (5) keterlibatan kandidat perempuan yang cukup signifikan, (6) munculnya kandidat yang berasal dari TNI/Polri aktif, (7) minimnya kader partai murni (pengurus partai) yang menjadi kepala daerah, (8) kandidat dalam Pemilukada umumnya berasal dari birokrat dan pengusaha, (9) beberapa orang anggota DPR dan DPRD menjadi kandidat dalam Pemilukada.

Selain catatan-catatan di atas perlu ditambahkan bahwa Pemilukada sesungguhnya juga merupakan ajang bagi partai-partai politik untuk berkompetisi dan juga berkoalisi. Praktik “*checks and balances*” dalam politik lokal pasca-Pemilukada menjadi sesuatu yang semakin lazim, walaupun pola koalisi di tingkat lokal tidak sama dengan di tingkat nasional.

Secara umum Pemilukada langsung dicatat, secara teoritis akan meningkatkan demokrasi. Keterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpin lokal bukan saja sebagai wujud partisipasi masyarakat namun akan memperbesar akuntabilitas dan responsibilitas (Widodo, 2009). Kendati memiliki berbagai macam kelebihan, Pemilukada langsung juga memiliki berbagai macam kelemahan yang secara substantif dapat merongrong nilai-nilai demokrasi. Di

antara kelemahan tersebut adalah (1) mendorong berkembangnya praktek politik uang dalam skala massif atau sering juga disebut sebagai fenomena pragmatisme-transaksional yang meluas di tengah-tengah masyarakat, (2) membuka kemungkinan terjadi konflik sosial yang melibatkan akar rumput (*grass root*) yang kompleks dan seringkali berdurasi lama, (3) membuka kemungkinan munculnya kasus korupsi akibat proses penyelesaian sengketa Pemilu yang tidak efisien, bahkan dalam beberapa kasus telah melibatkan oknum petinggi MK, (4) membuka kemungkinan merebaknya investor politik atau *botoh* yang mendistorsi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan uang, dan (5) mendorong rusaknya netralitas birokrasi sipil maupun militer (Hadiawan, 2009).

Sejarah mencatat bahwa dalam Pemilu selama ini Partai Golkar sebagai partai politik yang besar tidak pernah absen karena terdukung sejumlah potensi unggulan. Partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki infrastruktur dan jaringan politik yang luas (*nationwide*) sebagai lanjutan perkembangannya pada masa Orde Baru (Tandjung, 2007). Sebagai partai terbuka (*cath-all party*), Partai Golkar memiliki kader yang beraneka ragam latar belakang. Pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung yang berlatar belakang aktivis tampaklah dominasi kader-kader yang berlatar belakang aktivis dan mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kendatipun golongan pengusaha juga sudah mulai eksis (Tomsa, 2008). Namun pada masa berikutnya, yaitu pasca-Munas VII tahun 2004 di Denpasar Bali, kalangan politisi berlatar belakang pengusaha (*businessmen/entrepreneur*) semakin menguat perannya dalam kepengurusan partai yang dipimpin Jusuf Kalla. Hal yang hampir sama terjadi

pasca-Munas VIII tahun 2009 di Pekanbaru, Riau, seiring dengan terpilihnya Aburizal Bakrie yang berlatar belakang pengusaha sebagai ketua umum Partai Golkar. Walaupun dominasi itu bukan dalam jumlah pengurusnya, pengaruh politik golongan pengusaha di lingkaran elite kekuasaan Partai Golkar kian meningkat (Tomsa, 2008).

Hal lain yang mengemuka dalam tubuh Partai Golkar adalah semakin terasa adanya praktik-praktik pragmatisme-transaksional dalam proses kompetisi politik internalnya, termasuk ketika partai ini menggelar konvensi penjarangan calon presiden menjelang Pilpres tahun 2004 (Tomsa, 2008). Dalam konteks ini Tomsa (2008) mencatat kecenderungan bahwa para pengurus Partai Golkar di daerah-daerah memiliki posisi yang semakin kuat dalam merespons kemauan para elite politik nasional partai, sehingga pola-pola tradisional pengambilan keputusan mereka menjadi semakin sulit untuk diwujudkan. Apa yang digambarkan di atas mencerminkan adanya pergeseran pengaruh penting dalam tradisi kepolitikan pada suksesi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar di mana digambarkan pengaruh elite yang kharismatik tidak dapat mengalahkan elite lainnya yang mampu menjanjikan “akses langsung terhadap sumberdaya pemerintahan yang menguntungkan (*lucrative government resources*)” (Tomsa, 2008).

Fenomena naiknya kalangan pengusaha pada taraf tertentu terjadi juga di berbagai daerah. Selain karena tuntutan kondisi kepolitikan lokal yang mendorong pengusaha berkiprah langsung di ranah politik praktis, keberadaan kalangan pengusaha di kepengurusan partai politik di daerah juga tidak dapat dilepaskan dari jejaring politik para politisi berlatar belakang pengusaha di tingkat nasional.

Tuntutan kebutuhan pendanaan partai politik dan Pemilu membuat partai politik, termasuk Partai Golkar membuka peluang yang lebar bagi kehadiran para politisi berlatar belakang pengusaha (Tomsa, 2008). Dalam konteks situasi demikianlah Partai Golkar turut berkiprah dalam Pemilukada.

Sejak pertengahan 2005 hingga 24 September 2007 Partai Golkar memenangi 125 atau 40,19% dari 311 Pemilukada se-Indonesia. Partai Golkar membukukan kemenangan di enam provinsi dan 119 Kabupaten/kota. Dari total pelaksanaan Pemilukada tingkat kabupaten/kotamadya Partai Golkar berkoalisi dengan partai-partai lain di 40 Pemilukada (inilah.com, 22 November 2007). Sementara itu hingga tahun 2013 Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengklaim dari 250 Pemilukada maka sebanyak 60 persen calon yang diusung Golkar meraih kemenangan (Kompas.com 5 April 2013). Data dan keterangan tersebut setidaknya-tidaknya menggambarkan data hingga tahun 2012 yang menjadi batas akhir periode dalam penelitian ini Partai Golkar cukup prospektif meraih kemenangan dalam berbagai Pemilukada.

Penelitian dalam studi ini memiliki perspektif yang sama dengan studi-studi di atas, yakni perilaku pemilih. Namun demikian, studi ini berbeda dengan studi-studi terdahulu, karena memusatkan pengamatan terutama pada konteks perilaku pemilih sebuah partai politik, yaitu Partai Golkar, dalam tiga Pemilukada yang berbeda. Dengan kata lain, studi ini mengarah pada analisis kecenderungan-kecenderungan perilaku memilih pemilih Partai Golkar di tiga daerah yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, studi ini lebih spesifik karena perilaku memilih pemilih Partai Golkar diperbandingkan dalam kasus Pemilukada di tiga

daerah di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap pada kurun waktu 2011-2012. Mengingat penelitian ini spesifik dan belum ada pihak yang melakukannya maka terdapat jaminan orisinalitas penelitian yang tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam studi ini perilaku pemilih Partai Golkar akan diteliti secara mendalam di tiga daerah sebagai lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap. Penetapan ketiga daerah atau kabupaten itu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pengamatan historis yang menunjukkan Partai Golkar memiliki pengalaman yang berbeda-beda di ketiga lokasi penelitian yang memiliki karakter sosial dan kultural yang berbeda-beda, sehingga wajar apabila perilaku pemilihnya dikaji secara mendalam. Alasan lain adalah tinjauan kewilayahan yang menunjukkan daerah Kabupaten Batang merepresentasikan wilayah utara-barat (barat laut) Jawa Tengah, daerah Kabupaten Cilacap merepresentasikan wilayah selatan-barat (barat daya) Jawa Tengah, sedangkan daerah Kabupaten Sragen sebagai representasi wilayah tengah dan timurnya Jawa Tengah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan posisi wilayah itu pun mencerminkan perbedaan karakter sosial budaya masing-masing. Kabupaten Batang pada batas-batas tertentu seperti halnya Kabupaten Cilacap mencerminkan karakter sosial budaya pesisiran. Namun demikian, Cilacap tidak sepenuhnya mencerminkan daerah pesisir yang mempunyai karakter pesisir seperti Kabupaten Batang, tetapi juga memiliki sejarah politik pesisir yang apabila dikaitkan dengan posisinya di

Partai Golkar ternyata berbeda dengan tempat-tempat di pedalaman Jawa. Sementara itu Kabupaten Sragen yang mencerminkan kultur pedalaman dapat dikaitkan dengan sejarah kekuasaan Jawa pada zaman atau era Mataram yang telah meninggalkan kultur maritim dan keterbukaan, sehingga ke pedalaman semakin tertutup, kalau bukan feodalistik (Madjid, 1997).

Di sisi lain, jika dikaitkan dengan perspektif Geertzian, ketiga daerah itu juga mencerminkan karakter sosio-religius yang berbeda-beda, terutama apabila dikaitkan dengan konteks Nasionalis-Abangan versus Santri. Secara umum pada perspektif tersebut Jawa Tengah merupakan basis kekuatan politik Nasionalis-Abangan tanpa mengabaikan adanya kantong-kantong dukungan suara kalangan Santri. Kendatipun memiliki jarak sejarah yang sudah cukup lama dari Pemilu 1955 dan telah melalui masa depolitisasi Orde Baru, studi King (2003) misalnya mencatat adanya kontinuitas politik aliran dan basis pembelahan antara Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Menurut King (2003), para pemilih di daerah-daerah yang mendukung partai-partai nasionalis (Muslim Abangan) maupun yang mendukung partai Islam (Muslim Santri), ternyata muncul kembali pada Pemilu 1999. Kontinuitas basis dukungan itu turut berpengaruh pada perilaku pemilih Indonesia di daerah-daerah pada pasca-Orde Baru. Studi tersebut setidaknya meninggalkan pertanyaan untuk dikaji lebih lanjut, apakah kontinuitas perilaku pemilih signifikan atau tidak pada Pemilu-Pemilu pasca-1999 termasuk dalam Pemilukada di Jawa Tengah.

Pengalaman lapangan menunjukkan data bahwa pada Pemilukada tahun 2005 sampai tahun 2008 Kabupaten Sragen dipimpin oleh Bupati Untung

Wiyono, Kabupaten Batang dipimpin oleh Bambang Bintoro, dan Kabupaten Cilacap dipimpin oleh Probo Yulastoro yang masing-masing diusung PDI-Perjuangan dan juga didukung kekuatan legislatif (DPRD) yang sangat representatif menyokong kekuatan pemerintahan selama kepala daerah tersebut duduk di pemerintahan karena PDI-Perjuangan mempunyai kursi legislatif yang dominan. Kekuatan-kekuatan tersebut termanifestasi melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dalam mempengaruhi pilihan masyarakat terlihat pada posisi partai pengusung PDI-Perjuangan yang dapat memenangi Pemilu legislatif pada tahun 2009.

Kondisi tersebut berimplikasi pada pertarungan Pemilukada periode kedua yakni Pemilukada langsung oleh rakyat. Dominasi kekuatan PDI-Perjuangan mengkooptasi seluruh potensi politik lokal masing-masing daerah tersebut yang berimplikasi pada semua partai selain PDI-Perjuangan mengalami *underdog*, sehingga partai di luar PDI-Perjuangan (tak terkecuali Partai Golkar) sulit mencari figur untuk calon kepala daerah serta dukungan politik lokal. Di sisi lain, PDI-Perjuangan telah memainkan politik dinasti seperti tampak di Kabupaten Sragen yang memunculkan putri kandung bupati petahana menjadi kandidat Bupati, yaitu Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Di Kabupaten Batang tercatat bupati petahana dua periode dari PDI-Perjuangan mengusung istri bupati menjadi kandidat, yaitu Susi Irwani, sedangkan di Kabupaten Cilacap PDI-Perjuangan mengusung kandidat yang tidak lain adalah anak ketua Dewan Pengurus Cabang PDI-Perjuangan yang sekaligus ketua DPRD Kabupaten Cilacap, yaitu Novita Wijayanti.

Data itu mengisyaratkan dominasi kekuatan politik lokalnya yang abangan berdasarkan kekuatan PDI-Perjuangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa justru Partai Golkar yang dipilih sebagai variabel penting yang diteliti perilaku pemilihnya? Dalam perspektif sejarah politik Indonesia sejak 1955 situasi politik pasca-Orde Baru telah membuka peluang bagi pola kesinambungan dan perubahan politik. Golkar sebagai entitas politik yang selalu menang pada masa Orde Baru segera menghadapi kompleksitas tantangan baru, termasuk yang terkait dengan kontinuitas kepolitikan lama. Peta politik Jawa Tengah memperlihatkan tantangan nyata itu, terutama ketika Golkar, kendati merupakan “*catch-all party*” (partai terbuka), namun tidak lantas diidentikkan sebagai kekuatan politik nasionalis, atau dalam batas tertentu Soekarnoïs. Oleh karena itu dalam konteks ini Golkar akan lebih berat dalam berkompetisi di basis-basis yang secara historis sosio-politik adalah basis Nasionalis (quasi-Soekarnoïs) di daerah-daerah tertentu, atau Islamis di daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Merujuk studi Tandjung (2007), Golkar yang tetap eksis dan *survive* di era politik pasca-Orde Baru, bagaimanapun merupakan entitas politik yang unik. Hal ini, setidaknya disebabkan oleh banyaknya tekanan dari berbagai kekuatan politik era transisi yang menghendaki pembubaran Golkar secara hukum. Di berbagai daerah, termasuk di basis-basis Nasionalis-Abangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada periode krusial 1999-2004 Golkar termasuk sasaran tembak demoralisasi. Beberapa kantor Partai Golkar dibakar dan berbagai temu kader pun dikacaukan. Tetapi era tersebut kemudian dapat dilalui. Sebagai kekuatan utama dalam politik nasional Partai Golkar terlibat dalam berbagai proses perubahan

sistem politik dan dengan modal kelembagaan yang dimilikinya maka Partai Golkar termasuk yang paling siap dalam menghadapi kompetisi politik apapun. Kemampuan untuk melakukan adaptasi dan respons yang rasional sebagai cerminan watak pembaharu itulah yang membuat Golkar eksis melalui fase transisi yang turbulensif (Tandjung, 2007).

Watak pembaharuan Partai Golkar itu sesungguhnya telah tercermin sejak kelahirannya. Secara resmi hari kelahiran Partai Golkar dikaitkan dengan pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Saat itu Golkar hadir di tengah-tengah kompetisi politik yang demikian ketat diwarnai oleh ideologi-aliran. Golkar yang hadir sebagai perkembangan lebih lanjut dari gagasan dan ruang politik kelompok nonpartai politik atau yang dikenal sebagai golongan fungsional, terutama pada Era Demokrasi Terpimpin yang didominasi oleh politik Soekarno, kemudian menjadi alternatif kekuatan politik baru. Pada Pemilu pertama kali masa Orde Baru 1971 Golkar yang merepresentasikan kekuatan politik pemerintah tampil sebagai pemenang. Demikian pula dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru berikutnya, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sebagai kekuatan "*single majority*", Golkar menjadi elemen politik penting di tingkat nasional dan lokal. Namun demikian, dalam ranah politik lokal masa Orde Baru, kompetisi politik setiap kali Pemilu seringkali berjalan sangat dinamis, di mana terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar, tetapi kepada salah satu dari dua partai politik lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai

Demokrasi Indonesia (PDI).

Kemenangan-kemenangan Golkar pada masa Orde Baru secara nasional maupun dalam ranah politik lokal tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur politik yang menopangnya, terutama militer atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, sejak jatuhnya Orde Baru, Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar tidak lagi berada dalam situasi dan sistem politik yang sama seperti sebelumnya. Pada masa itu Partai Golkar melakukan respons struktural keorganisasian yang sangat mendasar sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya paradigma baru sebagai hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada 1998 (Tandjung, 2007). Melalui perubahan-perubahan mendasar yang bersifat adaptif seperti itulah Partai Golkar mampu mengelola kelembagaan partainya di tengah-tengah realitas elektoral yang kompetitif di Era Reformasi pasca-1998. Eksistensi dan survivalitas Partai Golkar di era transisi berlanjut hingga Pemilu demi Pemilu sejak Pemilu 1999, dan sebagaimana diuraikan di atas, ketika Pemilu langsung diterapkan pasca-Pemilu 2004 maka Partai Golkar termasuk kekuatan politik yang cukup siap.

Dari uraian di atas maka rumusan masalah studi ini dapat disederhanakan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peta politik nasional dan daerah (data Sragen, Batang dan Cilacap)?
2. Bagaimanakah karakteristik pemilih Partai Golkar?
3. Bagaimanakah perilaku memilih pemilih Partai Golkar dalam Pemilu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap pada tahun

2011-2012?

4. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan para pemilih untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati?
5. Apakah hasil penelitian ini untuk pengembangan model perilaku pemilih dalam Pemilukada?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Teoritis

1. Mengidentifikasi peta politik nasional dan daerah, khususnya Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap.
2. Menjelaskan karakteristik pemilih Partai Golkar di Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap.
3. Mengidentifikasi dan menyusun pola perilaku pemilih Partai Golkar pada Pemilukada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap pada tahun 2011-2012.
4. Mengidentifikasi dan menggambarkan faktor-faktor yang membentuk pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap kandidat yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pemilukada di pada tahun 2011-2012.
5. Menyusun suatu model Pemilukada berdasarkan temuan studi ini.

1.3.2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan perilaku pemilih Partai Golkar pada Pemilukada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap, pada tahun 2011-2012.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sumbangan pemikiran kepada Ilmu Politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan proses transisi demokrasi dalam Pemilu langsung di Jawa Tengah, khususnya studi mengenai perilaku pemilih, studi partai politik, dan transisi demokrasi dan desentralisasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Dapat mengidentifikasi peta politik nasional yang mempunyai keceratan dengan peta politik pemilih di tiga kabupaten (Sragen, Batang, Cilacap).
2. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi karakteristik politik perilaku pemilih di tiga kabupaten (Sragen, Batang, Cilacap).
3. Dapat menjelaskan faktor-faktor keterpilihan kandidat Bupati dan Wakil Bupati oleh pemilih Partai Golkar.
4. Dapat memberikan kontribusi tentang deskripsi model pola perilaku pemilih pada partai politik, terutama Partai Golkar di Jawa Tengah.
5. Dapat memberikan pemahaman perbaikan perilaku politik masyarakat.